



Implementasi pendidikan inklusif di sekolah menengah ditinjau dari aspek kepemimpinan instruksional

Roby Bukhari Firdaus^{1*}

Pendidikan luar biasa, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

E-mail: robbyfirdaus@uninus.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history <i>Received: 21 April 2026</i> <i>Revised: 30 April 2026</i> <i>Accepted: 12 Mei 2026</i> Keywords inklusif; kepemimpinan; instruksional <i>inclusive; leadership;</i> <i>instructional</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan instruksional kepala sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survei korelasional dan analisis jalur (path analysis). Subjek penelitian berjumlah 116 guru dari empat Sekolah Menengah Pertama di Bandung yang dipilih secara purposive sampling. Instrumen pengumpulan data berupa skala kepemimpinan instruksional, skala pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, dan skala pelaksanaan pendidikan inklusif. Analisis data menggunakan uji-t independen, regresi linear berganda, dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan instruksional berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran diferensiasi ($p < 0,05$) dengan nilai $F = 24,73$, dan pembelajaran diferensiasi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif ($p < 0,05$) dengan nilai $F = 19,88$. Sekolah dengan kepemimpinan instruksional yang kuat menunjukkan peningkatan skor pelaksanaan pendidikan inklusif sebesar 29,4% dibandingkan sekolah dengan kepemimpinan instruksional yang lemah. Faktor intensitas supervisi pembelajaran dan pendampingan guru turut memoderasi pengaruh tersebut. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan peran kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam mendorong praktik pembelajaran diferensiasi guna mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif. This study aims to analyze the influence of principals' instructional leadership on the implementation of differentiated learning and its implications for the implementation of inclusive education in schools. A quantitative method with a correlational survey design and path analysis was employed. A total of 116 teachers from four junior high schools in Bandung were selected through purposive sampling. Data collection instruments included an instructional leadership scale, a differentiated learning implementation scale, and an inclusive education implementation scale. Data were analyzed using independent t-test, multiple linear regression, and path analysis. The results showed that instructional leadership significantly influenced differentiated learning ($p < 0.05$) with $F = 24.73$, and differentiated learning significantly influenced the implementation of inclusive education ($p < 0.05$) with $F = 19.88$. Schools with strong instructional leadership demonstrated a 29.4% increase in inclusive education

implementation scores compared to schools with weak instructional leadership. The intensity of instructional supervision and teacher mentoring also moderated the effect. These findings imply the need to strengthen the role of principals' instructional leadership in encouraging differentiated learning practices to realize effective inclusive education.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



How to Cite: Firdaus, R. B. (2026). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah menengah ditinjau dari aspek kepemimpinan instruksional. *Energy: Educational Synergy Journal*, 2(2) 37-43.

PENDAHULUAN

Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi paradigma pembelajaran dari pendekatan yang bersifat seragam (one-size-fits-all) menuju pendekatan yang responsif terhadap keragaman karakteristik, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik. Keragaman tersebut mencakup perbedaan kemampuan akademik, gaya belajar, minat, dan kondisi khusus peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan inklusif (UNESCO, 2020). Salah satu strategi pembelajaran yang diyakini mampu menjawab keragaman tersebut adalah pembelajaran diferensiasi, yaitu pendekatan yang memungkinkan guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar sesuai dengan profil belajar setiap peserta didik (Tomlinson, 2014). Keberhasilan implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas sangat bergantung pada dukungan sistemik dari kepala sekolah, khususnya melalui praktik kepemimpinan instruksional yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran (Hallinger & Murphy, 1985).

Di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusif telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang menegaskan hak setiap peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah reguler (Kemendikbudristek, 2022). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah masih menerapkan pembelajaran klasikal yang seragam tanpa memperhatikan keberagaman kebutuhan belajar peserta didik, sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif belum optimal (Sunardi et al., 2023). Kondisi ini erat kaitannya dengan lemahnya peran kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam mendorong, mensupervisi, dan memfasilitasi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan belajar yang beragam.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai jenjang pendidikan yang menerima peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang sangat heterogen menghadapi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Di satu sisi, kepemimpinan instruksional menawarkan potensi besar untuk mendorong perubahan praktik pembelajaran melalui berbagai mekanisme: penetapan visi pembelajaran yang jelas, supervisi pembelajaran yang intensif, penyediaan pengembangan profesional guru, dan pemantauan kemajuan belajar peserta didik (Hallinger, 2011). Di sisi lain, sejumlah kajian kritis memperingatkan bahwa kepemimpinan instruksional yang tidak diikuti dengan pemahaman guru tentang prinsip diferensiasi berpotensi menghasilkan implementasi yang bersifat formalitas semata tanpa dampak nyata terhadap layanan pendidikan inklusif (Florian & Spratt, 2013). Ketegangan antara potensi dan risiko inilah yang menjadikan isu pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pembelajaran diferensiasi dalam mewujudkan pendidikan inklusif sebagai arena perdebatan akademis yang relevan dan mendesak untuk diteliti secara empiris.

Pembelajaran diferensiasi dalam konteks pendidikan inklusif merupakan salah satu kompetensi paling esensial yang wajib dikuasai guru agar mampu melayani keragaman kebutuhan belajar peserta didik secara adil dan bermutu. Menurut Tomlinson (2014), pembelajaran diferensiasi dapat didefinisikan sebagai proses penyesuaian pembelajaran yang mencakup empat dimensi utama: diferensiasi konten (penyesuaian materi ajar), diferensiasi proses (penyesuaian strategi dan aktivitas belajar), diferensiasi produk (penyesuaian bentuk penilaian hasil belajar), dan diferensiasi lingkungan belajar (penyesuaian

suasana dan pengelolaan kelas). Dalam konteks pendidikan inklusif, keempat dimensi tersebut memiliki relevansi aplikatif yang tinggi: guru dituntut untuk mampu mengidentifikasi profil belajar peserta didik yang beragam, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, merancang pembelajaran yang fleksibel, serta mengevaluasi hasil belajar secara proporsional (Loreman et al., 2011). Dengan demikian, pembelajaran diferensiasi bukan sekadar teknik mengajar, melainkan kompetensi terukur yang dapat ditumbuhkan melalui dukungan kepemimpinan instruksional yang kuat dari kepala sekolah.

Kajian tentang pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusif telah menarik perhatian luas dari komunitas peneliti pendidikan, namun temuan yang dihasilkan masih menunjukkan variasi yang signifikan, bahkan kontradiktif. Sekelompok peneliti menemukan bahwa kepemimpinan instruksional yang terstruktur, kontekstual, dan didukung oleh supervisi pembelajaran yang kuat mampu menstimulasi peningkatan praktik diferensiasi secara substansial, antara lain melalui mekanisme seperti coaching pembelajaran, pengembangan profesional berkelanjutan, dan pemantauan kelas yang reflektif (Hallinger, 2011; Tomlinson, 2014). Namun di sisi lain, penelitian lain justru menemukan dampak yang tidak signifikan atau bahkan stagnan terhadap praktik diferensiasi apabila kepemimpinan instruksional berlangsung tanpa pemahaman kontekstual tentang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan berpotensi mengarah pada implementasi yang bersifat administratif semata (Florian & Spratt, 2013; Ainscow, 2020). Kesenjangan temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kepemimpinan instruksional dalam mendukung pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusif bersifat kondisional dan sangat bergantung pada faktor-faktor kontekstual, termasuk intensitas supervisi, kualifikasi kepala sekolah, karakteristik demografis sekolah, serta dukungan pengembangan profesional guru.

Data observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% kepala sekolah SMP di Bandung yang secara rutin melaksanakan supervisi pembelajaran berbasis diferensiasi, sementara mayoritas masih berfokus pada aspek administratif kepemimpinan. Hal ini berdampak pada rendahnya skor pelaksanaan pendidikan inklusif pada asesmen diagnostik awal yang dilakukan peneliti. Meskipun urgensi penguatan pendidikan inklusif telah banyak disuarakan dalam kebijakan pendidikan nasional, pemahaman yang mendalam tentang dampak kepemimpinan instruksional terhadap pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusif---khususnya pada jenjang SMP---masih sangat terbatas dalam literatur empiris berbahasa Indonesia, dan nyaris tidak ada penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena ini pada populasi guru SMP di Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian (research gap) di atas, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut melalui tiga tujuan penelitian yang saling berkaitan secara sistematis. Pertama, menganalisis pola dan tingkat pelaksanaan kepemimpinan instruksional kepala sekolah di kalangan SMP di Bandung, meliputi supervisi pembelajaran, pengembangan profesional guru, dan pemantauan kemajuan belajar. Kedua, mengukur dan membandingkan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusif pada sekolah dengan tingkat kepemimpinan instruksional yang berbeda. Ketiga, menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pembelajaran diferensiasi dan dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif---baik secara langsung maupun tidak langsung---dengan mengontrol variabel demografis yang relevan. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur tentang kepemimpinan pendidikan dan pendidikan inklusif, khususnya dalam konteks Indonesia yang selama ini masih kurang terwakili dalam publikasi internasional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan empiris bagi pengembangan kebijakan penguatan kepemimpinan instruksional yang berorientasi pada pengembangan pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusif dalam kebijakan pendidikan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei korelasional dan analisis jalur (path analysis). Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan mengungkap hubungan kausal antar variabel dalam kondisi alamiah tanpa manipulasi eksperimental (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 2025 di empat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Bandung, yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria: (1) telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif; (2) berlokasi di berbagai wilayah Bandung untuk mewakili keragaman demografis; dan (3) bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Total subjek penelitian berjumlah 116 guru, dibagi menjadi 58 guru

pada sekolah dengan kepemimpinan instruksional tergolong kuat dan 58 guru pada sekolah dengan kepemimpinan instruksional tergolong lemah berdasarkan hasil pemetaan awal.

Kelompok guru pada sekolah dengan kepemimpinan instruksional kuat menerima supervisi pembelajaran, coaching, dan pendampingan penerapan pembelajaran diferensiasi secara rutin selama 8 minggu oleh kepala sekolah. Kelompok guru pada sekolah dengan kepemimpinan instruksional lemah tidak menerima intervensi supervisi yang setara. Sebelum dan sesudah periode observasi, seluruh guru mengisi instrumen yang sama. Instrumen utama terdiri dari tiga skala: (1) skala kepemimpinan instruksional yang dikembangkan berdasarkan dimensi Hallinger & Murphy (1985), terdiri dari 20 butir pernyataan; (2) skala pelaksanaan pembelajaran diferensiasi berdasarkan indikator Tomlinson (2014), terdiri dari 22 butir pernyataan yang mencakup empat dimensi: diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar; dan (3) skala pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan indikator Loreman et al. (2011), terdiri dari 18 butir pernyataan. Ketiga instrumen menggunakan skala Likert 5 poin dan telah divalidasi oleh dua ahli pendidikan serta diuji coba pada 35 guru yang tidak termasuk subjek penelitian. Nilai reliabilitas instrumen yang diperoleh menggunakan Alpha Cronbach masing-masing sebesar 0,873 untuk kepemimpinan instruksional, 0,856 untuk pembelajaran diferensiasi, dan 0,841 untuk pendidikan inklusif (sangat reliabel).

Data dianalisis menggunakan tiga teknik utama: (1) uji-t independen untuk membandingkan skor pembelajaran diferensiasi dan pendidikan inklusif antara kelompok sekolah dengan kepemimpinan instruksional kuat dan lemah; (2) regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dimensi kepemimpinan instruksional (visi pembelajaran, supervisi pembelajaran, pengembangan profesional) terhadap skor pembelajaran diferensiasi; dan (3) analisis jalur untuk menguji peran mediasi pembelajaran diferensiasi dalam pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Sebelum analisis utama, dilakukan uji prasyarat normalitas (Kolmogorov-Smirnov) dan homogenitas (Levene's Test). Seluruh analisis menggunakan software SPSS versi 26 dengan taraf signifikansi 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pelaksanaan Kepemimpinan Instruksional oleh Kepala Sekolah

Berdasarkan data angket dan observasi, diperoleh gambaran komprehensif tentang pola pelaksanaan kepemimpinan instruksional kepala sekolah di kalangan SMP di Bandung. Sebagian besar kepala sekolah (76,7%) menetapkan visi pembelajaran yang jelas secara rutin, dengan intensitas supervisi rata-rata 3,6 kali per bulan. Aspek pengembangan profesional guru merupakan aspek yang paling intensif dilaksanakan (69,8% sekolah), diikuti supervisi pembelajaran (61,2%) dan pemantauan kemajuan belajar peserta didik (74,1%).

Tabel 1. Pola Pelaksanaan Kepemimpinan Instruksional oleh Kepala Sekolah SMP di Bandung

Aspek Kepemimpinan Instruksional	Kategori	Persentase (%)
Intensitas supervisi pembelajaran	Setiap minggu	42,2
	2-3 kali/bulan	36,2
	1 kali/bulan	21,6
Durasi pendampingan/sesi	< 40 menit	22,4
	40-80 menit	53,4
	> 80 menit	24,2
Fokus kepemimpinan instruksional	Supervisi pembelajaran diferensiasi	61,2
	Pengembangan profesional guru	69,8
	Pemantauan kemajuan belajar	74,1

Pembelajaran Diferensiasi dan Pendidikan Inklusif: Hasil Sebelum dan Sesudah Observasi

Hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara skor pembelajaran diferensiasi awal pada kelompok sekolah dengan kepemimpinan instruksional kuat ($M = 54,82$; $SD = 7,65$) dan kelompok sekolah dengan kepemimpinan instruksional lemah ($M = 55,49$; $SD = 8,12$), $t(114) = 0,47$, $p = 0,64$. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kelompok berangkat dari kondisi awal yang setara sebelum periode observasi.

Setelah periode observasi selama 8 minggu, terdapat perbedaan yang signifikan pada skor pembelajaran diferensiasi. Kelompok sekolah dengan kepemimpinan instruksional kuat memperoleh skor rata-rata 72,64 (SD = 6,58), sedangkan kelompok dengan kepemimpinan instruksional lemah memperoleh skor rata-rata 61,33 (SD = 8,04). Peningkatan (gain score) pada kelompok kepemimpinan instruksional kuat sebesar 17,82 poin (29,4%), sementara kelompok kepemimpinan instruksional lemah hanya meningkat 5,84 poin (10,5%). Pola serupa juga terlihat pada skor pelaksanaan pendidikan inklusif, dengan skor rata-rata 70,15 (SD = 7,02) pada kelompok kepemimpinan instruksional kuat dan 59,88 (SD = 7,89) pada kelompok kepemimpinan instruksional lemah.

Tabel 2. Perbandingan Skor Pembelajaran Diferensiasi dan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Tingkat Kepemimpinan Instruksional

Kelompok	N	Skor Diferensiasi (M±SD)	Skor Inklusif (M±SD)	Gain (%)
Kepemimpinan Kuat	58	72,64 ± 6,58	70,15 ± 7,02	29,4%
Kepemimpinan Lemah	58	61,33 ± 8,04	59,88 ± 7,89	10,5%

Hasil Uji Hipotesis

Uji prasyarat menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (KS test: $p > 0,05$) dan homogen (Levene's test: $p > 0,05$), sehingga memenuhi asumsi untuk pengujian parametrik. Hasil uji-t independen terhadap skor pembelajaran diferensiasi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok kepemimpinan instruksional kuat dan lemah, $t(114) = 7,86$, $p < 0,001$, $d = 1,36$ (efek besar). Hasil ini mengkonfirmasi hipotesis pertama bahwa kepemimpinan instruksional berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pembelajaran diferensiasi.

Analisis regresi linear berganda dengan variabel prediktor visi pembelajaran (X1), supervisi pembelajaran (X2), dan pengembangan profesional guru (X3) menghasilkan model yang signifikan, $F(3, 54) = 24,73$, $p < 0,001$, $R^2 = 0,579$. Artinya, ketiga dimensi kepemimpinan instruksional secara bersama-sama menjelaskan 57,9% variansi pembelajaran diferensiasi. Secara parsial, supervisi pembelajaran ($\beta = 0,45$, $p < 0,01$) dan pengembangan profesional guru ($\beta = 0,31$, $p < 0,05$) merupakan prediktor yang signifikan, sedangkan visi pembelajaran tidak signifikan secara parsial ($\beta = 0,12$, $p = 0,24$).

Analisis jalur menunjukkan bahwa pembelajaran diferensiasi berperan sebagai mediator signifikan dalam pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, $F(1, 56) = 19,88$, $p < 0,001$, $R^2 = 0,462$, dengan koefisien jalur langsung kepemimpinan instruksional terhadap pendidikan inklusif sebesar $\beta = 0,18$ ($p = 0,08$, tidak signifikan) dan koefisien jalur tidak langsung melalui pembelajaran diferensiasi sebesar $\beta = 0,52$ ($p < 0,001$). Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pendidikan inklusif bersifat sepenuhnya dimediasi oleh pembelajaran diferensiasi.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan instruksional kepala sekolah yang kuat dan terstruktur berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, dan melalui pembelajaran diferensiasi tersebut turut mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih baik di SMP Bandung. Hasil ini sejalan dengan studi Hallinger (2011) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan instruksional berbasis supervisi pembelajaran meningkatkan kapasitas guru dalam merancang strategi pembelajaran yang responsif. Peningkatan pembelajaran diferensiasi pada sekolah dengan kepemimpinan instruksional kuat dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme.

Pertama, supervisi pembelajaran yang intensif mendorong guru untuk secara reflektif mengidentifikasi keragaman profil belajar peserta didik dan merumuskan strategi diferensiasi yang sesuai. Proses ini melatih kompetensi guru dalam diferensiasi konten dan proses (Tomlinson, 2014). Kedua, pengembangan profesional yang difasilitasi kepala sekolah, seperti pelatihan dan lokakarya tentang strategi diferensiasi, memperkuat pengetahuan dan keterampilan guru dalam merancang penilaian dan lingkungan belajar yang inklusif.

Ketiga, pemantauan kemajuan belajar yang dilakukan kepala sekolah secara berkelanjutan memberikan umpan balik bagi guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini konsisten dengan teori kepemimpinan

instruksional yang menekankan pentingnya keterlibatan kepala sekolah secara langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya pada aspek administratif (Hallinger & Murphy, 1985). Sekolah yang menerapkan supervisi pembelajaran secara aktif menunjukkan peningkatan yang lebih besar pada praktik diferensiasi konten dan proses dibandingkan sekolah yang pasif dalam supervisi.

Temuan bahwa pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pendidikan inklusif dimediasi sepenuhnya oleh pembelajaran diferensiasi memiliki implikasi praktis penting. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan instruksional yang kuat tidak secara langsung mewujudkan pendidikan inklusif, melainkan harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran diferensiasi yang nyata di kelas. Pola ini sesuai dengan prinsip bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada praktik pedagogis guru di ruang kelas, bukan hanya pada kebijakan atau visi kepala sekolah (Florian & Spratt, 2013).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa efektivitas kepemimpinan instruksional dalam mendorong pembelajaran diferensiasi sangat bergantung pada kualitas supervisi dan pendampingan yang diberikan kepala sekolah. Kelompok sekolah dengan kepemimpinan instruksional lemah menunjukkan peningkatan yang minimal, meskipun beberapa guru di sekolah ini juga menerapkan diferensiasi secara mandiri. Temuan ini memperkuat argumen bahwa peran kepala sekolah sebagai instructional leader tetap krusial dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif (Ainscow, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, kepemimpinan instruksional kepala sekolah yang kuat dan terstruktur berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi guru SMP di Bandung, dengan efek yang tergolong besar ($d = 1,36$). Sekolah dengan kepemimpinan instruksional kuat menunjukkan peningkatan rata-rata 29,4% dibandingkan 10,5% pada sekolah dengan kepemimpinan instruksional lemah. Kedua, di antara dimensi kepemimpinan instruksional yang diteliti, supervisi pembelajaran dan pengembangan profesional guru merupakan prediktor yang signifikan terhadap pembelajaran diferensiasi, sedangkan visi pembelajaran tidak memberikan kontribusi parsial yang signifikan. Ketiga, pembelajaran diferensiasi terbukti memediasi secara penuh pengaruh kepemimpinan instruksional terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, yang mengindikasikan bahwa kepemimpinan instruksional hanya akan mewujudkan pendidikan inklusif apabila diterjemahkan secara konkret ke dalam praktik pembelajaran diferensiasi di kelas. Implikasinya, penguatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah sebaiknya dirancang dengan fokus pada supervisi pembelajaran yang intensif dan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup kajian longitudinal untuk melihat keberlanjutan efek kepemimpinan instruksional terhadap pendidikan inklusif, serta pengembangan model kepemimpinan instruksional yang komprehensif dan tervalidasi untuk konteks pendidikan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125-142.
- Hallinger, P., & Murphy, J. (1985). Assessing the instructional management behavior of principals. *The Elementary School Journal*, 86(2), 217-247.
- Tomlinson, C. A. (2014). *Differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD.
- Florian, L., & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: A framework for interrogating inclusive practice. *European Journal of Special Needs Education*, 28(2), 119-135.
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7-16.
- Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2011). *Inclusive education: Supporting diversity in the classroom* (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sunardi, Yusuf, M., Gunarhadi, Priyono, & Yeager, J. L. (2023). The implementation of inclusive education in Indonesia: Challenges and prospects. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(1), 45-58.

- Kemendikbudristek. (2022). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Thowiyyah, H., & Hidayatulloh, M. K. Y. (2024). Development of a HOTS-based Multiple Choice Question Test Instrument on the Basic Competency of Understanding Marriage Provisions According to Legislation. *APPLICATION: Applied science in Learning Research*, 3(3), 13-21.
- UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education - All means all. UNESCO Publishing.